

**PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)**

**(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2015 -2019)**

**Elsa Fyodella<sup>1)</sup>, Nasrizal<sup>2)</sup>, Volta Diyanto<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

*Email: [elsafyodella@gmail.com](mailto:elsafyodella@gmail.com)*

*The Effect Of Sharia Supervision Board, Audit Committee, Managerial Ownership And Institutional Ownership On Islamic Social Reporting (ISR)  
(Empirical Study On Islamic Commercial Banks In Indonesia In 2015-2019)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the Sharia Supervision Board, Audit Committee, Managerial Ownership and Constitutional Ownership on Islamic Social Reporting (ISR) in 2015-2019. The population in this study were all Islamic commercial banks in Indonesia amounting to 14 units of Islamic commercial banks based on data from the Financial Services Authority (OJK). The sampling technique using purposive sampling technique. The sample amounting to 11 companies in 2015-2019, so that the research data analyzed amounted to 55. The data analysis technique using descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression analysis. The results of this study found that (1) The Sharia Supervisory Board has an effect on the disclosure of ISR. (2) The Audit Committee has an effect on the disclosure of ISR. (3) Managerial Ownership has an effect on ISR disclosure. (4) Institutional Ownership has an effect on ISR disclosure.*

*Keywords: Islamic Social Reporting (ISR), Sharia Supervision Board, Audit Committee, Managerial Ownership and Institutional Ownership.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. CSR menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis dan banyak investor di seluruh dunia lebih memilih untuk berinvestasi diperusahaan yang bertanggung jawab secara sosial (Cahya, 2021).

Meskipun pelaporan sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) saat ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, tetapi pelaporan tersebut masih belum relevan dalam perspektif Islam (Haniffa, 2002). CSR tidak hanya ada di perusahaan konvensional tetapi juga

berkembang dalam perusahaan yang berbasis islam yang disebut dengan Islamic Social Reporting.

Islamic Social Reporting (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Tujuan pelaporan ISR adalah akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dalam kesesuaian dengan kebutuhan rohani para pembuat keputusan (Cahya, 2021;92).

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item item CSR yang semestinya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Sehingga dapat dikatakan Islamic Social Reporting (ISR) ini sebagai Model Pelaporan CSR Institusi Bisnis Syariah (Othman et al, 2010).

Pada tahun 2019 bank yang terbanyak melaporkan item ISR ialah Bank Muamalat Indonesia yaitu dari 48 item ia melaporkan sebanyak 41 item, sedangkan yang terendah adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yaitu dari 48 item ia melaporkan 32 item. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial secara syariah setiap Bank Umum Syariah (BUS) berbeda-beda, ada bank yang melakukan pengungkapan tanggungjawab syariah dengan baik, namun ada pula bank yang melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial secara syariah dengan cukup minim.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah (Firdaus dkk, 2007). Menurut Umar & Habib (2008) tugas dewan pengawas syariah adalah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, serta melakukan evaluasi dan pengawasan agar perusahaan senantiasa mematuhi aturan syariah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit berperan dalam membantu dewan pengawas yaitu memberi penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standard dapat dicegah.

Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus

pemegang saham diperusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan besarnya presentase kepemilikan oleh manajer.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki intitusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau intitusi lain (Sugiarto, 2009). Menurut Sutojo dan Alridge (2008) investor institusional mempunyai kemampuan untuk memonitor kegiatan bisnis perusahaan dikarenakan jumlah saham kepemilikan institusional cukup besar.

Berdasarkan fenomena, teori dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2015 - 2019)”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Shari'ah Enterprise Theory (SET)*

Menurut Meutia (2010: 28) *Shari'ah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang sudah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transedental dan lebih humanis. Dalam teori ini mencakup nilai-nilai syariah yaitu keadilan, rahmat alilalamin ,dan masalah (Triuwono,2009).

Dalam pemahaman *syariah enterprise theory* cocok dengan *Islamic Social Reporting*, dimana penerapan ISR mengungkapkan item- item tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip islam, antara lain ialah konsep zakat, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab serta konsep falah.

### *Teori Stakeholder*

Menurut Ghazali dan Chariri (2007) Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Terkait pada penelitian ini, *stakeholder* memerlukan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengungkapan (*disclosure*) terkait praktik sosial responsibility yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengungkapan melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

### **Teori Legitimasi**

Menurut Cahya (2021) teori legitimasi merupakan asumsi secara umum yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan didasarkan dan disesuaikan dengan konsep, nilai kepercayaan, dan ketentuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menampakkan tujuannya yang sejalan dengan masyarakat.

Berdasarkan teori legitimasi perusahaan dapat mempunyai peluang untuk membentuk suatu kontrak sosial dengan masyarakat yakni dengan melaksanakan dan melaporkan segala kegiatan indeks ISR dalam sebuah pengungkapan indeks ISR. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi atau reaksi positif bagi perusahaan sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik.

### **Islamic Social Reporting (ISR)**

Menurut AAOIFI *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibility* sebagai lembaga finansial baik bagi individu maupun institusi. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan

karyawan. Ketiadaan standar CSR secara Syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan Syariah menjadi tidak seragam dan standar.

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah (Firdaus dkk, 2007). Menurut Umar & Habib (2008) tugas dewan pengawas syariah adalah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, serta melakukan evaluasi dan pengawasan agar perusahaan senantiasa mematuhi aturan syariah.

### **Komite Audit**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Komite Audit ialah kepanjangan dari tangan dewan komisaris dalam hal pengawasan kinerja perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Menurut Gestari (2014) dalam Mahdalena (2017) ukuran rapat komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif.

### **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham diperusahaan. Nurahman dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan

hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah lembar saham milik institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar dalam perusahaan.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap ISR**

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah (Firdaus dkk, 2007). Menurut Umar & Habib (2008) tugas dewan pengawas syariah adalah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, serta melakukan evaluasi dan pengawasan agar perusahaan senantiasa mematuhi aturan syariah.

Dalam kaitannya dengan teori, menurut Cahya (2021) teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, di mana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah serta dapat menjalankan fungsi bank Syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

**H<sub>1</sub> : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting**

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap ISR**

Komite audit dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan

*Islamic Social Reporting (ISR)* Index agar regulasi Bank terpenuhi serta menjalankan fungsi bank umum syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, di mana dengan adanya tata kelola yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah serta dapat menjalankan fungsi bank Syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Demikian dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting.**

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan ISR**

Menurut Zulaikha (2014:182), manajemen dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini terkait pemilik perusahaan yang sekaligus menjadi manajemen perusahaan yang tercermin dalam keberadaan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan (Ramdhaningsih dan Utama, 2013).

Menurut teori legitimasi, pengungkapan ISR merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan sehingga akan meningkatkan citra perusahaan. Semakin bagus citra perusahaan di mata *stakeholders*, maka harapannya semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dan *return* yang diperoleh pemegang saham selaku manajemen akan semakin besar. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka diharapkan akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR yang dilakukan oleh perusahaan (Sari,2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan ISR**

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin optimal pengawasan perusahaan tersebut. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 14 unit bank umum syariah berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan periode tahun penelitian 2015-2019. Metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sample* dengan kriteria:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan mulai dari tahun 2015- 2019.
2. Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019 yang menerbitkan laporan

tahunannya melalui website masing-masing perusahaan.

3. Bank Umum Syariah yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah sebanyak 11 bank yang memenuhi kriteria penelitian dengan jangka waktu 5 tahun (2015-2019).

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 23 yang dijalankan dengan media komputer. Model pengukuran digunakan menggunakan metode analisis regresi berganda, yang diawali dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji Hipotesis.

### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

#### ***Islamic Social Reporting (ISR)***

Menurut AAOIFI *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibility* sebagai lembaga finansial baik bagi individu maupun institusi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Islamic Social Reporting index*, dengan ketentuan penilaian yaitu, nilai 0 diterapkan jika sama sekali tidak adanya pengungkapan yang berhubungan dengan komponen tersebut dan nilai 1 diterapkan jika pengungkapan dilakukan.

Indeks ISR dalam penelitian ini menggunakan indeks ISR dari penelitian Setiawan dkk. (2016) yang berisi 48 item pengungkapan ISR yang diadaptasi dari indeks ISR yang dibuat Haniffa (2002) dan kemudian dikembangkan oleh Othman et. al. (2009).

### **Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Dewan

Pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Variabel dewan pengawas Syariah diukur dengan skala nominal yaitu dengan menghitung jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Khoirudin, 2013).

### Komite Audit

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugasnya. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan.

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah atau frekuensi rapat komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan (Gestari, 2014).

### Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam sebuah perusahaan (Nurahman dan Sudarno, 2013).

Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Murwaningsari (2009:27) yang mengukur kepemilikan manajerial dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{kepemilikan manajerial} = \frac{\text{jumlah saham manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

### Kepemilikan institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan (Sugiarto, 2009).

Berikut rumus menghitung kepemilikan institusional merujuk penelitian Murwaningsari (2009:27) :

$$\% \text{kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018:19).

Berikut ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif:

### 1. Pengungkapan ISR

**Tabel 1: Analisis Deskriptif Pengungkapan ISR**

Kode	NAMA BANK	Indeks ISR (Y)				
		2015	2016	2017	2018	2019
BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia	41	42	42	42	42
BRIS	PT. Bank BRISyariah	36	38	38	39	39
BJBS	PT. Bank Jabar Banten Syariah	38	36	38	36	36
BNIS	PT. Bank BNI Syariah	39	39	39	40	40
BSM	PT. Bank Syariah Mandiri	41	41	40	40	40
BMS	PT. Bank Mega Syariah	32	32	33	33	33
BPDS	PT. Bank Panin Dubai Syariah	35	37	37	38	38
BSB	PT. Bank Syariah Bukopin	35	37	37	37	37
BCAS	PT. BCA Syariah	34	34	36	37	37
BTPNS	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	32	32	32	32	32
MBS	PT. Maybank Syariah Indonesia	31	35	35	34	34
<b>Rata-Rata</b>						<b>36.7273</b>
<b>Standar Deviasi</b>						<b>3.13555</b>
<b>Minimum</b>						<b>31</b>
<b>Maximum</b>						<b>42</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai pengungkapan *ISR* memiliki nilai minimum 31 item dan nilai tertinggi 42 item. Untuk nilai rata – rata pada variabel *Islamic Social Reporting* memiliki nilai 36.7273 dan nilai standar deviasi sebesar 3.13555.

### 2. Pengungkapan ISR

**Tabel 2: Analisis Deskriptif Dewan Pengawasan Syariah**

Kode	NAMA BANK	Jumlah DPS (X1)				
		2015	2016	2017	2018	2019
BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia	3	2	2	3	3
BRIS	PT. Bank BRISyariah	2	2	2	2	3
BJBS	PT. Bank Jabar Banten Syariah	3	4	4	4	3
BNIS	PT. Bank BNI Syariah	4	4	4	4	6
BSM	PT. Bank Syariah Mandiri	4	3	3	3	3
BMS	PT. Bank Mega Syariah	2	2	2	3	3
BPDS	PT. Bank Panin Dubai Syariah	3	3	2	2	3
BSB	PT. Bank Syariah Bukopin	4	4	2	2	4
BCAS	PT. BCA Syariah	2	2	2	2	2
BTPNS	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2	2	2	2	2
MBS	PT. Maybank Syariah Indonesia	2	2	2	2	2
<b>Rata-Rata</b>						<b>2.7455</b>
<b>Standar Deviasi</b>						<b>0.90714</b>
<b>Minimum</b>						<b>2</b>
<b>Maximum</b>						<b>6</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa Dewan Pengawasan Syariah memiliki nilai minimum 2 dan nilai tertinggi 6. Untuk nilai rata – rata pada variabel ini memiliki nilai 2,7455 dan nilai standar deviasi sebesar 0,90714.

### 3. Komite Audit

**Tabel 3: Analisis Deskriptif Komite Audit**

Kode	NAMA BANK	Jumlah Rapat Komite Audit(X2)				
		2015	2016	2017	2018	2019
BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia	3	6	4	4	5
BRIS	PT. Bank BRISyariah	21	30	21	19	12
BJBS	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	9	11	17	15
BNIS	PT. Bank BNI Syariah	19	19	19	21	22
BMSM	PT. Bank Syariah Mandiri	13	13	15	5	5
BMS	PT. Bank Mega Syariah	3	3	4	4	9
BPDS	PT. Bank Paman Dubai Syariah	19	18	18	14	15
BSE	PT. Bank Syariah Bukopin	12	10	12	12	18
BCAS	PT. BCA Syariah	7	6	6	14	8
BTSPS	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	8	8	9	5	9
MBS	PT. Maybank Syariah Indonesia	9	8	8	9	8
<b>Rata- Rata</b>					<b>11.4545</b>	
<b>Standar Deviasi</b>					<b>6.17287</b>	
<b>Minimum</b>					<b>3</b>	
<b>Maximum</b>					<b>30</b>	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa Komite audit memiliki nilai minimum 3 dan nilai tertinggi 30. Untuk nilai rata – rata pada variabel Komite Audit memiliki nilai 11,4545 dan nilai standar deviasi sebesar 6,17287.

### 4. Kepemilikan Manajerial

**Tabel 4: Analisis Deskriptif Kepemilikan Manajerial**

<b>Rata- Rata</b>	<b>0.0026</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>0.00921</b>
<b>Minimum</b>	<b>0.00</b>
<b>Maximum</b>	<b>0.05</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum 0 dan nilai tertinggi 0,05. Untuk nilai rata – rata pada variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 0,0026 dan nilai standar deviasi sebesar 0,00921.

### 5. Kepemilikan Institusional

**Tabel 5: Analisis Deskriptif Kepemilikan institusional**

<b>Rata- Rata</b>	<b>0.317391</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>0.4516119</b>
<b>Minimum</b>	<b>0</b>
<b>Maximum</b>	<b>1.00</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 0 dan nilai tertinggi 1. Untuk nilai rata – rata pada variabel kepemilikan institusional memiliki nilai 0,317391 dan nilai standar deviasi sebesar 0,4516119.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak.

**Tabel 6: Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03690754
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.061
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansinya (Asymp.Sig. (2-tailed)) lebih besar dari 0.05, yaitu nilai 0.200 > 0.05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

### 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variable bebas memiliki masalah multikolonieritas atau tidak.

**Tabel 7: Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Pengawas Syariah	.872	1.147
Komite Audit	.768	1.302
Kepemilikan Manajerial	.850	1.176
Kepemilikan Institusional	.893	1.120

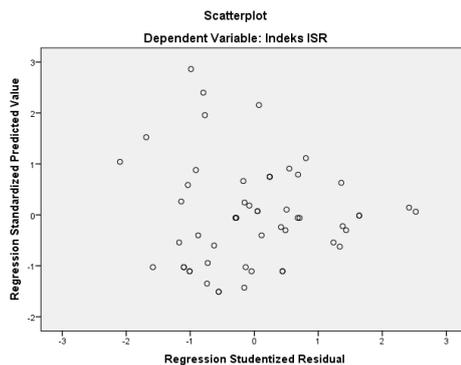
Sumber: Data Olahan

Hasil uji model yang ditampilkan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 sedangkan nilai VIF di bawah 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang multikolinieritas antar variabel.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

**Gambar 1: Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Olahan

Pengujian dilakukan melalui pengamatan terhadap pola *scatterplot* yang dihasilkan melalui olah data SPSS. Pada gambar diatas juga menunjukkan bahwa, titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu t dengan kesalahan pada periode waktu t-1

**Tabel 8: Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>a</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.760 <sup>a</sup>	.578	.544	2.11682	.578	17.121	4	50	.000	1.164

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Instiusional, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit  
b. Dependent Variable: Indeks ISR

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel Durbin Waston diatas diketahui bahwa nilai Durbin Waston hitung sebesar 1,164. Berdasarkan hasil diatas, diketahui (Durbin Watson) terletak antara  $du < d < 4-du = 1,7240 > 1,164 < 2,276$  maka dapat diartikan terdapat autokorelasi pada model regresi.

Karena regresi mengandung masalah autokorelasi maka diperlukan tindakan perbaikan sehingga pada penelitian ini menggunakan metode *Cochrane-ortcutt* ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorekasi (Ghozali,2016).

**Tabel 9 : Uji Autokorelasi setelah Metode Cochrane-ortcutt**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.511 <sup>a</sup>	.261	.200	1.81818	.261	4.321	4	49	.005	1.882

a. Predictors: (Constant), LAG\_X4, LAG\_X3, LAG\_X1, LAG\_X2

b. Dependent Variable: LAG\_Y

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil diatas, diketahui (Durbin Watson) terletak antara  $du < d < 4-du$ . Berdasarkan hasil diatas, diketahui (Durbin Watson) terletak antara  $du < d < 4-du = 1,7240 < 1.882 < 2,276$  maka dapat diartikan penelitian telah terbebas dari autokorelasi pada model regresi

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

**Tabel 10 : Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.242	1.009		29.959	.000
Dewan Pengawas Syariah	1.155	.340	.334	3.396	.001
Komite Audit	.192	.053	.378	3.605	.001
Kepemilikan Manajerial	179.791	33.933	.528	5.298	.000
Kepemilikan Instiusional	2.066	.675	.298	3.061	.004

a. Dependent Variable: Pengungkapan ISR

Sumber : Data olahan

Dari tabel diatas hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka

didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = 30.242 + 1.155 X_1 + 0,192 X_2 + 179.791 X_3 + 2.066 X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta = 30.242 menunjukkan bahwa jika variabel (X) bernilai 0 (nol) maka (Y) bernilai sebesar 30.242
2. Nilai koefisien regresi variabel (X1) adalah 1.155 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 1.155
3. Nilai koefisien regresi variabel (X2) adalah 0,192 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0,192
4. Nilai koefisien regresi variabel (X3) adalah 179,791 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 179,791
5. Nilai koefisien regresi variabel (X4) adalah 2,066 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X4) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 2.066

### Uji Hipotesis

#### Uji T

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,05 dapat diketahui sebagai berikut: Nilai t tabel dengan jumlah sampel (n) = 55, jumlah variabel bebas (k) = 4, taraf signifikansi 5% atau 0,05.

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= n - k : \alpha/2 \\ &= 55 - 4 : 0,05/2 \\ &= 51 : 0,025 \\ &= 2,00758 \text{ (pada t-tabel)} \end{aligned}$$

Keputusan hipotesis yang dapat disimpulkan :

1. Nilai signifikansi dewan pengawas syariah sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $3,396 > t \ 2,00758$ . Dengan demikian hipotesis 1 yang dirumuskan diterima dengan hasil dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
2. Nilai signifikansi komite audit sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $3.605 > t \ 2,00758$ . Dengan demikian hipotesis 2 yang dirumuskan diterima dengan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
3. Nilai signifikansi kepemilikan manajerial sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $5.298 > t \ 2,00758$ . Dengan demikian hipotesis 3 yang dirumuskan diterima dengan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
4. Nilai signifikansi kepemilikan institusional sebesar  $0,004 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $3.061 > t \ 2,00758$ . Dengan demikian hipotesis 4 yang dirumuskan diterima dengan hasil kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 11: Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 <sup>a</sup>	.578	.544	2.11682

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit  
b. Dependent Variable: Pengungkapan ISR

Sumber: Data Olahan

Secara simultan variabel dewan pengawas syariah, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan kontribusi sebesar 0,544 atau 54,4% (nilai Adjusted R square) dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel

pengungkapan Islamic Social Reporting sedangkan sisanya sebesar 45,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Dewan Pengawasan Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa Dewan Pengawasan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Isu tanggung jawab sosial dalam prespektif syariah sangat cocok dibandingkan dengan *shari'a enterprise theory* untuk membantu manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban serta di intenasikan dengan nilai tauhid. Sehingga dengan adanya dewan pengawas Syariah akan mampu meningkatkan Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang mana sesuai *Shari'ah Enterprise Theory* akan membantu manajemen dalam melakukan pengelolaan sesuai Syariah islam.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ramadhani (2016) dan Mahdalena (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran dewan pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

### 2. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hal ini juga sesuai dengan teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya* (pemegang saham,

kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat dengan hadirnya peran komite audit didalam perusahaan, maka segala upaya akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya dengan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahdalena (2017) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hal ini juga sesuai dengan teori legitimasi mengatakan bahwa manajemen perlu melakukan legitimasi atau upaya yang dapat meyakinkan publik yang dapat menumbuhkan citra yang baik di mata masyarakat maupun pihak *stakeholders*. Pengungkapan ISR akan meningkatkan kinerja manajemen karena akan mampu mendapatkan kepercayaan ataupun citra yang baik dimata public.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Listyaningsih *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusaha-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*.

### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan teorinya semakin besarnya proporsi kepemilikan institusional atau Lembaga lain dalam

kepemilikan saham didalam suatu perusahaan maka akan semakin besar pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang diambil perusahaan salah satunya mengenai isu tanggung jawab social yang sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan kedepannya. Dengan besarnya proporsi kepemilikan institusional didalam Bank Umum Syariah, maka kebijakan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* akan semakin ditingkatkan untuk pertumbuhan perusahaan kedepannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Husna (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ISR

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
2. Hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
4. Hasil pengujian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

### Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Serta mengembangkan sampel penelitian yang digunakan dalam menganalisa faktor-faktor dalam mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) agar mendapatkan jawaban yang lebih beragam dan lebih luas.

2. Pemerintah

Disarankan untuk mengeluarkan peraturan/undang-undang khusus mengenai praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia karena belum ada peraturan baku mengenai item-item pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

3. Bank Umum Syariah

Disarankan bagi setiap perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja tidak hanya berdasarkan pada keuangan saja namun bisa meningkatkan kinerja non keuangan seperti meningkatkan tanggung jawab social dilingkungan masyarakat seperti *Islamic Social Reporting*.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (1999). Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions, (Manama, Bahrain: AAOIFI)
- Cahya, Bahyu Tri. 2021. Islamic Social Reporting : Transformasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Syariah. Jakarta : KENCANA
- Firdaus, Indra. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal online

- mahasiswa bidang ilmu ekonomi. Universitas Riau.
- Gestari, Intan (2014) Pengaruh Good corporate governance Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R., (2002). Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. Indonesian Management & Accounting Research (IMAR journal), 1(2), 128-146.
- Khoirudin, Amirul. 2013. Corporate governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal 2 (2) (2013).
- Listyaningsih, E., Dewi, R., Baiti, N. (2018). The Effect of Good corporate governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, 4(3).
- Mahdalena. 2017. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. Jurnal Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Meutia, Inten. Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis). (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010
- Murwaningsih, E. 2009. Hubungan Corporate governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol.11 (1), hh.30-41.
- Nurrahman, Adimulya Dan Sudarno. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report, Simposium Nasional Akuntansi Volume 2, Nomor 2, 2013 Halaman 1-14. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Othman, Rohana. 2010. "Islamic Social Reporting of Listed Companies In Malaysia". Internasional Business & Economics Research Journal – April 2010.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015.
- Rajawali Pers.
- Ramadhaningsih, Amalia dan I Made Karya Utama. 2013. Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Akuntansi. Vol. 3, No.3, Juni 2013.
- Sari, M. S. & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good corporate

- governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), Seri C, 751-7678.
- Sugiarto. 2009. Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri, Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutojo, siswanto & aldrige, E john. 2008. *Good Corporate Govenance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka
- Triyuwono, I. (2009). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta:
- Umer chapra & Habib ahmed, *Corporate governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:PT. Bumi aksara, 2008), 42.
- Zulaikha. 2014. Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social Reporting. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 10, No. 2, Mei 2014